

Kepentingan dalam mutasi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bungo pada tahun 2021

Garry Ananda Putra^{1*}, Syaiful², Tamrin³

^{1,2,3} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

*E-mail: putrarinaldi0701@gmail.com

Abstract: The influence of politics on the bureaucracy or commonly known as the politicization of the bureaucracy is one of the phenomena that often occurs in government bodies. After the regional head elections, the desire to reorganize civil servants or the state civil apparatus within the scope of regional administration can increase. This thesis aims to identify and analyze the interests of regional heads in politicizing the bureaucracy in the implementation of ASN mutations after the regional head elections took place in the Bungo Regency government environment. This study uses a qualitative method with a case study approach to answer research question. The theory used is the theory of bureaucratic politicization by Barbara Geddes. The results of this study indicate that the Bungo Regent's interest in the bureaucracy is to want a loyal bureaucratic machine so that it is then able to fulfill its interests in realizing the vision and mission in terms of developing Bungo Regency and also other interests such as maintaining its power.

Keywords: Politicization of bureaucracy, SCA transfer; regional head elections, Bungo Regency.

PENDAHULUAN

Politisasi birokrasi merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada negara berkembang dan menjadi sebuah strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah. Fenomena ini terjadi ketika para pejabat yang memegang jabatan tinggi atau jabatan tingkat atas melakukan mobilisasi terhadap bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar dan diharapkan nantinya akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini akan menjadi penyebab birokrasi yang tidak mempunyai akuntabilitas kepada masyarakat (Erman & Rayadi, 2014)). Politisasi birokrasi pada dasarnya berangkat dari kajian keilmuan tentang politik birokrasi (*bureaucratic politics*).

Birokrasi sangat rentan terlibat dalam politik praktis, terkhusus pada masa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Keterlibatan birokrasi dalam politik praktis biasanya dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon dan melakukan mobilisasi terhadap bawahan dan massa di sekitarnya untuk mendukung calon tersebut.

Pejabat politik (*political leadership*) dan birokrasi memiliki hubungan yang konstan antara fungsi kontrol dan dominasi. Pada pola hubungan semacam ini, akan senantiasa memunculkan suatu persoalan mengenai siapa yang mengontrol siapa dan siapa pula yang menguasai, memimpin, dan mendominasi siapa (Carino, 1994 dalam Thoah, 2008).

Pasca pemilihan kepala daerah keinginan merombak pejabat dan pegawai di lingkup pemerintahan daerah bisa meningkat. Mutasi Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah dinamika dalam ruang lingkup manajemen kepegawaian pada pemerintah. Manajemen kepegawaian ini atau proses mutasi ini yang sering dilakukan pemerintah daerah cenderung akan menimbulkan fenomena profesional maupun politis.

Ketika terjadi pergantian Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati, maka pergantian eksekutif birokrasi di bawahnya pasti akan selalu terjadi beriringan juga. Proses ini selalu terjadi setiap kali kepala daerah mengalami pergantian kepemimpinan. Pergantian eksekutif birokrasi atau yang lebih dikenal pada kalangan masyarakat umum dengan sebutan “Mutasi”, selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama kalangan birokrasi sendiri pasca dilantiknya seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah baru pada suatu provinsi atau kabupaten/kota.

Pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2020, Kabupaten Bungo salah satu Kabupaten yang masuk dalam daftar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 kemarin. Pemilihan kepala daerah tersebut diadakan untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo periode 2021-2024. Pemilihan kepala daerah tersebut dimenangkan oleh pasangan petahana Mashuri-Safrudin Dwi Apriyanto nomor urut 2. Fenomena yang menarik pasca pemilihan kepala daerah serentak 2020 tersebut adalah ketika Bupati Bungo terpilih, Mashuri melakukan mutasi terhadap 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena politisasi birokrasi yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Bungo.

Salah satu perspektif mengenai pembahasan politisasi birokrasi adalah dari Barbara Geddes yang merupakan ilmuwan politik Amerika. Geddes mengkaji persoalan politik birokrasi yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Dalam penelitiannya Geddes mencoba mengungkapkan keniscayaan birokrasi dalam pemerintahan dari sudut pandang kepentingan politisi terhadap birokrasi.

Menurut Barbara Geddes (1993), yang menggunakan kerangka teori rasional (*rational theory*), ketika seorang terpilih di puncak kekuasaan eksekutif ada tiga hal atau kepentingan yang akan ia lakukan. Pertama, memastikan bahwa ia akan bertahan setidaknya dalam periode kepemimpinannya (*Current survival*). Kedua, menciptakan mesin politik yang loyal dan akan mendukungnya (*Creation of loyal political machine*). Ketiga, menciptakan pemerintahan yang efektif (*Effective government*). Pemerintahan yang efektif berarti pemerintahan yang setidaknya mampu melakukan fungsi-fungsi dasarnya yakni pelayanan pada masyarakat regulasi dan fungsi kontrol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengungkapkan gejala-gejala secara holistik kontekstual (penyeluruhan dan sesuai konteks) Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2009, p. 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan studi tentang apa yang ada pada kelompok secara deskriptif dan bagaimana kelompok menanggapi fenomena yang dihadapi. Menurut Creswell (1998), studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perombakan birokrasi yang merupakan agenda dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk penyegaran, jenjang karier pegawai, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, merupakan hal yang memang sangat penting untuk dilakukan. Namun dalam praktiknya masih diintervensi oleh faktor-faktor yang berada di luar kepentingan dari tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri terutama pada masa pasca pemilihan kepala daerah. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Bungo berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Hal tersebut menjadi penting dilakukan dan sangat berhubungan dengan pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara agar terciptanya struktur birokrasi yang baik dan efektif.

Kedudukan pejabat politik sebagai kepala daerah menjadi sebuah dilema tersendiri bagi birokrasi, karena kewenangan yang dimiliki kepala daerah sangat berpotensi melahirkan kepentingan yang sifatnya politis. Kewenangan kepala daerah yang mutlak terhadap bawahannya di daerahnya dapat mengurangi ataupun menambah derajat profesionalisme di ranah birokrasi. Tidak sedikit kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menghadapi fenomena politisasi birokrasi dalam tubuh pemerintahannya.

Pada hasil dan temuan dalam penelitian ini, peneliti melihat persoalan mutasi Aparatur Sipil Negara yang terjadi pasca Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bungo tahun 2020 ini dari sudut pandang kepentingan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bungo sesuai dengan teori politisasi birokrasi yang dibangun oleh Barbara

Geddes, yaitu terdapat tiga poin penting yang diungkapkan oleh Geddes bagaimana melihat kepentingan politisi setelah terpilih pada puncak kekuasaan eksekutif terhadap birokrasi dalam struktur pemerintahan yaitu, 1) Melanggengkan/ mempertahankan kekuasaan; 2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan 3) Mewujudkan efektivitas pemerintahan.

1) Melanggengkan/Mempertahankan Kekuasaan

Ketika kita membicarakan persoalan mengenai politisi, tentu sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Pada setiap negara atau pemerintahan memiliki struktur yang jelas dengan hierarkinya pada kepala negara atau kepala daerah dalam lingkup yang lebih kecil dan memegang penuh kontrol kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tantangannya adalah ketika melihat dari sudut pandang keilmuan mengenai politisasi birokrasi (*bureaucratic politics*). Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) cenderung melahirkan kepentingan pribadi sebagaimana yang dikatakan oleh Geddes dalam Syaiful (2017) bahwa salah satu kepentingan utama terhadap birokrasi adalah mempertahankan kekuasaannya, setidaknya hal tersebut mampu dipertahankan hingga akhir masa jabatan maupun untuk periode berikutnya.

Permasalahan yang peneliti lihat dalam mutasi ASN yang dilakukan pasca pemilihan kepala daerah ini adalah akibat dari efek pemilihan waktu pelaksanaan mutasi ASN yang dilakukan tepat pasca pemilihan kepala daerah berlangsung yang kemudian juga menarik perhatian adalah bahwa ASN yang dipindahkan merupakan keluarga ataupun kerabat dari pihak-pihak yang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain. Kemudian mereka yang dipindahkan ini juga dipindahkan ke penempatan di kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti di Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Tanah Tumbuh, dan Kecamatan Jujuhan.

Dalam tulisan *The Politics of Government Organization* yang ditulis oleh Harold Seidman dalam Syaiful (2017) menegaskan bahwa setiap politisi memiliki sebuah kepentingan pada penataan organisasi atau lembaga dalam pemerintahan. Setiap keputusan yang pejabat ambil dalam hal penempatan pejabat di struktur pemerintahan diambil dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dan salah satunya tidak lepas dari pertimbangan politik.

Dari berbagai data dan temuan yang peneliti dapatkan di atas, peneliti belum menemukan keterkaitan antara pelaksanaan mutasi ASN yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bungo dengan salah satu kepentingan utama politisi yang terpilih pada puncak kekuasaan eksekutif terhadap birokrasi adalah mempertahankan kekuasaannya, yang mana setidaknya hal tersebut mampu dipertahankan hingga akhir masa jabatan maupun untuk periode berikutnya.

Namun dalam temuan data peneliti yang lainnya peneliti berhasil menemukan keterkaitan antara pelaksanaan mutasi ASN yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bungo dengan

salah satu kepentingan utama politisi yang terpilih pada puncak kekuasaan eksekutif terhadap birokrasi yaitu mempertahankan kekuasaan walaupun hanya keterkaitan semu atau secara tidak langsung saja.

Mutasi ASN yang terjadi di Kabupaten Bungo ini dapat dikatakan merupakan suatu isu yang sifatnya politis, dan hal ini tentu terjadi saat kepemimpinan yang berganti ataupun ketika momen pasca pemilihan kepala daerah. Gaya kepemimpinan dan kepentingan yang dimiliki setiap kepala daerah yang terpilih yang juga merupakan kader partai politik tentu berbeda, akhirnya tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap keputusannya mengenai proses pelaksanaan mutasi pada struktur birokrasi yang ada.

Dalam tulisan "Kontestasi Politik dalam Birokrasi" yang ditulis oleh Syaiful (2017) mengatakan bahwa, para politisi menganggap birokrasi sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan kepentingannya, baik itu berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan program partai dari politisi tersebut. Seperti halnya Geddes mengatakan bahwa politisi yang berkuasa memiliki kepentingan tertentu dalam pemerintahan yaitu salah satunya berupa pemanfaatan sumber daya pegawainya. Birokrasi pada tataran praktisnya dapat menjadi sumber keuntungan atau patronasi sehingga cukup dibutuhkan bagi politisi untuk memenuhi kepentingannya.

Setelah peneliti mengolah data temuan yang ditemukan maka peneliti melihat bahwa pada indikator berikutnya yang disampaikan oleh Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi yang salah satunya adalah melanggengkan kekuasaan (*current survival*) kurang mendominasi dalam pelaksanaan mutasi ASN yang ditempatkan pada kecamatan-kecamatan yang jauh, namun lebih kental akan nuansa dendam politik. Adanya indikasi bahwa Bupati selaku PPK memutuskan untuk melakukan mutasi ASN dengan alasan ingin bekerja dengan orang-orang yang sesuai dengan kriterianya atau dalam hal ini secara garis mampu untuk menjalankan RPJMD dengan maksimal.

2) Menciptakan Mesin Politik yang Loyal

Konsep birokrasi yang sebagian besar dipahami atau digunakan para ilmuwan administrasi pada umumnya adalah konsep birokrasi dari Weber mengenai bagaimana idealnya birokrasi sebagai sarana merealisasikan tujuan dari pemerintahan. Dalam konsep birokrasi Weberian dalam tulisan Thoha (2016), bahwa birokrasi yang selama ini dipahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Setiap pejabat dalam birokrasi pemerintahan merupakan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman awal mengenai birokrasi adalah sebuah kekuatan yang netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan.

Perubahan yang terjadi pada tatanan sosial-politik pemerintahan saat ini di berbagai negara seluruh dunia mengalami dampak yang cukup signifikan, yakni bagaimana melihat konteks pemerintahan ke depannya akan seperti apa dan perubahan apa yang kemudian menjadi tantangan dunia hari ini. Pandangan Weber mengenai birokrasi sebagai suatu mesin birokrasi yang independen sepertinya tidak ditemukan lagi dalam pemerintahan pada umumnya, karena pandangan tersebut dipatahkan oleh realitas kehidupan politik masa ini. Posisi birokrasi yang awal mulanya berada di luar aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain, kini dijadikan sebagai mesin atau kekuatan politik bagi politisi yang berkuasa.

Apabila dihubungkan dengan fenomena yang peneliti temukan saat ini tentu sangat relevan dalam membuktikan bahwa argumentasi Weber mulai terbantahkan, karena pada konteks pemerintahan daerah dewasa ini khususnya di Indonesia, kepala daerah sebagai PPK lebih cenderung menentukan posisi birokrat berdasarkan loyalitas dibandingkan kompetensi secara mendasar dan apa yang peneliti temukan sejalan dengan salah satu argumentasi Geddes mengenai kepentingan politisi terhadap birokrasi yaitu menciptakan mesin politik yang loyal (*creation of loyal political machine*) untuk mendukung kebijakan dan tindakan politisi tersebut.

Tidak hanya kepala daerah yang memiliki kepentingan, namun terkadang pada satu momentum ASN juga memiliki kepentingan tersendiri, bisa itu untuk kepentingan masa depan jabatannya di pemerintahan dan lain sebagainya seperti yang dikatakan oleh Direktur Utama Tim pemenangan Hamas-April sebelumnya dan sejalan dengan pendapat Randal dalam Syaiful (2017) yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga kepentingan yang diinginkan birokrat terhadap institusinya yaitu; 1) mencoba untuk memperbesar wilayah kewenangan pada instansi kerjanya; 2) mencari peluang jabatan yang lebih tinggi; dan 3) menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para kliennya.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan peneliti dapat memastikan bahwa penyebab awal yang kemudian mengakibatkan bupati melakukan mutasi adalah ASN yang berada di sekitarnya saat itu menunjukkan sikap yang tidak loyal terhadapnya dan hal tersebut berdasarkan penilaian pribadi bupati sendiri. Sebagaimana keterangan dari Mashuri yang menyebutkan bahwa loyalitas memang jadi satu ukuran, karena kepala daerah tentu membutuhkan ASN yang loyal dan jika tidak, maka kepala daerah akan sulit bergerak.

Loyalitas birokrat tidak hanya menguntungkan bagi kepala daerah selaku PPK, namun bagi masing-masing birokrat yang loyal terhadap atasannya secara tidak langsung mampu memenuhi tiga kepentingan yang dikatakan oleh Randal di atas. Tidak menutup kemungkinan birokrat memiliki kepentingan yang serupa dengan pejabat politik untuk mempertahankan posisinya pada satu struktur pemerintahan dan berupaya untuk mendapatkan atau memperoleh promosi jabatan dalam struktur

pemerintahan. Akan tetapi tidak hanya semata-mata hanya loyalitas yang mampu mendorong eksistensi birokrat untuk memenuhi kepentingannya, namun perlu kompetensi yang menjadi daya tarik bagi PPK untuk menempatkan mereka pada posisi yang strategis, selain indikator loyalitas tadi.

Kepentingan bupati terhadap birokrasi memiliki hubungan yang erat dengan salah satu agenda politisi yakni menciptakan mesin politik yang loyal dari konsep pemikiran Geddes sebagai kekuatan politik untuk memenuhi agenda politiknya.

3) Mewujudkan Efektivitas Pemerintahan

Pemerintahan yang efektif berarti pemerintahan yang setidaknya mampu melakukan fungsi-fungsi dasarnya yakni pelayanan pada masyarakat regulasi dan fungsi kontrol. Efektivitas pemerintahan ini menjadi satu indikator yang menjadi alasan kepentingan politisi terhadap birokrasi, seperti yang dikatakan oleh Geddes selain dua indikator sebelumnya yang sudah peneliti jelaskan. Hal ini menjadi sebuah paradoks ketika indikator terakhir ini diungkapkan oleh Geddes berkaitan dengan kepentingan politisi terhadap birokrasi sebagai upaya mewujudkan efektivitas pemerintahan. Indikator ini memiliki nilai positif jika dibandingkan dengan dua indikator sebelumnya yang memiliki makna negatif dalam menjelaskan fenomena politisasi birokrasi pada pelaksanaan mutasi ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bungo tahun 2021.

Efektivitas pemerintahan pada umumnya merupakan satu tujuan dari perwujudan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Kemudian makna dari efektivitas ini sejalan dengan makna transparansi, akuntabilitas, profesionalisme yang mengarah pada nilai kebaikan dan membawa manfaat bagi jalannya roda pemerintahan. Namun, yang perlu diketahui adalah maksud dari Geddes mengenai efektivitas pemerintahan dalam konteks politisasi birokrasi memiliki makna ganda, selain tujuan asalnya mewujudkan pemerintahan yang efektif secara umum, namun ada kepentingan yang sifatnya politis. Seperti yang diutarakan oleh Syaiful (2017) bahwa makna efektivitas pemerintahan yang diungkapkan oleh Geddes bertujuan untuk membeli dukungan dari kalangan konstituen maupun lawan politiknya pada pemilu berikutnya.

Hal ini berarti sebagai politisi yang berkuasa, perlu pertimbangan dan langkah konkret yang perlu dilakukan jauh-jauh hari, karena politisi dan partai politik yang berkuasa membutuhkan dukungan dari pihak mana pun termasuk oposisi untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi selama perjalanan pemerintahan berlangsung. Peneliti akan menunjukkan keterangan beberapa informan yang berpandangan terkait dengan kepentingan bupati dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan. Pertama, peneliti mendapat keterangan dari Mashuri mengenai perwujudan efektivitas pemerintahan dalam fenomena mutasi ASN ini.

Memang pandangan beberapa pihak serta masyarakat pada umumnya terhadap mutasi ASN yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bungo pada tahun 2021 memang kurang baik, pasalnya pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ini ditujukan kepada ASN yang terindikasi terlibat dalam politik praktis dengan mendukung pasangan calon lain. Terlebih lagi penempatan ASN-ASN yang dimutasi ini ditempatkan di kecamatan-kecamatan yang jauh. Seperti keterangan yang peneliti dapat dari Auri selaku akademisi dan pengamat politik di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan temuan data melalui wawancara maupun dokumentasi yang peneliti dapatkan, kemudian dihubungkan dengan indikator efektivitas pemerintahan, peneliti belum mampu memberikan analisis secara mendalam dan memutuskan bahwa mutasi jabatan yang dilakukan mampu menciptakan efektivitas pemerintahan atau tidak. Karena penekanan pada indikator tersebut, bagaimana kemudian efektivitas pemerintahan ini mampu diciptakan oleh pemerintahan melalui penyegaran struktur birokrasi dengan pelaksanaan mutasi ASN yang dilakukan oleh bupati, namun hal itu perlu pembuktian dengan hasil riset secara mendalam pada dinas-dinas yang mengalami penyegaran pada struktur birokrasinya. Pada intinya, hal ini dapat peneliti simpulkan berdasarkan data dari informan wawancara kemudian peneliti mencoba menganalisa data secara etik bahwa keinginan kepala daerah sebagai bentuk pencarian dukungan pada konstituen maupun lawan politiknya itu pasti dilakukan.

Tujuan asal dari mutasi ASN ini tentu salah satunya adalah sebagai bentuk penyegaran struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, hal ini tentu menjadi satu kepentingan bupati untuk menarik simpati para kelompok kepentingan yang berada dalam struktur pemerintahan agar mampu memperkuat dirinya selaku pejabat politik yang berkuasa. Hal tersebut yang kemudian dilakukan oleh bupati terpilih yaitu Mashuri dengan melihat situasi dan kewenangan yang dimilikinya saat ini cukup kuat, akhirnya mendorongnya untuk melakukan mutasi ASN sebagai bentuk penyegaran birokrasi sesuai dengan tipe idealnya sendiri dan pastinya sejalan dengan visi misi yang dibawanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai identifikasi kepentingan dalam pelaksanaan mutasi ASN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo yang kemudian dilakukan pengumpulan data secara detail melalui metode wawancara dan juga mendapatkan dukungan data untuk dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data berdasarkan konsep teori politisasi birokrasi oleh pemikiran Barbara Geddes yang menjadi pedoman peneliti selama penelitian berlangsung, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa asumsi peneliti yang menitikberatkan persoalan mutasi ASN ini dengan adanya indikasi kepentingan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi dapat terjawab.

Kepentingan bupati selaku PPK dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Bungo menjadi bentuk politisasi birokrasi yang terjadi dikarenakan pada persoalan mutasi ASN tersebut adalah keputusan yang sejalan dengan konsep atau teori yang berasal dari pemikiran Barbara Geddes, bahwa kepentingan bupati sebagai pejabat politik yang memanfaatkan birokrasi untuk memenuhi tiga kepentingan utama yaitu, (1) Melanggengkan/mempertahankan kekuasaan; (2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan (3) Mewujudkan efektivitas pemerintahan. Secara umum, ketiga kepentingan utama tersebut memang dilakukan oleh bupati secara tidak langsung pada pelaksanaan mutasi ASN di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tiga kepentingan utama bupati dalam melakukan mutasi ASN, hanya satu indikator yang terlihat mendominasi kepentingan bupati secara pribadi. Menciptakan mesin politik yang loyal menjadi kebutuhan awal bupati agar kemudian mampu memenuhi kepentingannya dalam mewujudkan visi-misi dalam hal pembangunan Kabupaten Bungo dan juga terdapat kepentingan lainnya seperti mempertahankan kekuasaannya yang dilakukan secara tidak langsung. Hal ini bupati sebagai pejabat politik yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah saat ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya, tidak hanya uang namun sumber daya manusia terkhususnya di kalangan birokrasi. Kemudian pada indikator mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dan mewujudkan efektivitas pemerintahan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut belum dapat terjawab secara maksimal, detail dan komprehensif berdasarkan temuan data di lapangan maupun dukungan data sekunder sehingga untuk lebih lengkapnya akan peneliti sarankan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erman, E., & Rayadi, R. M. (2014). Politisasi birokrasi pada pemilihan umum kepala daerah (Studi mobilisasi pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun 2011). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Geddes, B. (1994). *Politician's dilemma: Building state capacity in Latin America*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Gunanto, D. (2020). Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2).
- Hasan, N. (2012). Corak budaya birokrasi pada masa kerajaan, kolonial Belanda hingga di era desentralisasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Hukum*, 28(2).
- Hidayati, R. N. (2012). Mutasi aparatur pemerintah dan kepentingan politik: Studi kasus Kabupaten Gresik dua tahun kepemimpinan Sambari Qosim. *Jurnal Politik Muda*, 2(1).
- Jihad, N. (2022). Politisasi birokrasi dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2021. (Undergraduate thesis). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi pemerintahan*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Romli, O. (2016). Tanpa incumbent, keterlibatan politik aparatur birokrasi pada pemilukada serentak menurun (Studi perbandingan pemilukada langsung Kabupaten Pandeglang tahun 2010 dengan tahun 2015). *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Rozi, S. (2006). *Zaman bergerak, birokrasi dirombak: Potret birokrasi dan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sairani, A. (2007). Dilema para politisi di tingkat lokal: Antara mimpi inovasi dan demokrasi (Kajian tentang dilema politisi eksekutif di Kabupaten Bantul dan Jembrana). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1).
- Sugiyanto. (2004). *Teori-teori hukum tata ruang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaiful. (2017). *Kontestasi politik dalam birokrasi*. Padang: Erka.
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2016). *Birokrasi & politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode penelitian studi kasus*. Bangkalan Madura: UTM Press.
- Yudiatmaja, W. E. (2015). Politisasi birokrasi: Pola hubungan politik dan birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(1), 10–28.